



RANCANGA AWAL RENCANA KERJA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

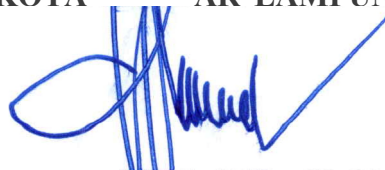
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung selama satu tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang pada khususnya.

Bandar Lampung,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG



WAKIL I S.H. M.Si
NIP. 19650710 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
 TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	36

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
	DAERAH	46
BAB V	PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja

dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2023-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2023-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung No 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang kebencanaan dan kebakaran meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-3 (tiga) dalam RPJMD Tahun 2023-2026 yaitu ***Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Ekonomi dan Pelayanan Sosial***. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung 2023-2026 dan RKPD Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung (Perwali) No. 70 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58)

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pelaksanaan misi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran berjalan 2026 dapat dilihat pada lampiran **tabel T-C.29**.

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Satuan Tahun 2025	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (RENA pada Tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA OPD s.d Tahun berjalan (Tahun 2025)	
									Target RENJA PD Tahun 2025	Realisasi RENJA PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya Keseluruhan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan				Indeks Resiko Bencana			152,816 (Tinggi)							
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat			Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPBD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)			79,01-81,00							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra BPBD	Dokumen Renstra BPBD	Dokumen	1							
				Dokumen Renja BPBD dan Dokumen Penetapan Kinerja BPBD Kota Bandar Lampung	Dokumen Renja BPBD dan Dokumen Penetapan Kinerja BPBD Kota Bandar Lampung	Dokumen	2							
				Dokumen Renja BPBD dan Perubahan Renja BPBD	Dokumen Renja BPBD dan Perubahan Renja BPBD	Dokumen	2							
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPI BPBD, Dokumen LPPD BPBD, Dokumen LAKIP Bappeda	Dokumen LPI BPBD, Dokumen LPPD BPBD, Dokumen LAKIP Bappeda	Dokumen	3							
				Dokumen Evaluasi Renstra BPBD	Dokumen Evaluasi Renstra BPBD	Dokumen	n/a							
				Dokumen Evaluasi Renja BPBD, Dokumen Evaluasi Renja Triwulanan BPBD dan Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan BPBD	Dokumen Evaluasi Renja BPBD, Dokumen Evaluasi Renja Triwulanan BPBD dan Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan BPBD	Dokumen	3							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan								
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Renstra BPBD Kota Bandar Lampung	Dokumen Evaluasi Renstra BPBD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1							
				Dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 2021-2026	Dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 2021-2026	Dokumen	n/a							
				Dokumen LPI, Dokumen LPPD, Dokumen LAKIP, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perubahan Penetapan Kinerja	Dokumen LPI, Dokumen LPPD, Dokumen LAKIP, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perubahan Penetapan Kinerja	Dokumen	5							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan								

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			12		12	25,54%	12	3	25
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Buhn	14		14	25,61%	12	3	25
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		12	24,22%	12	3	25
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD			12		12		12	3	25
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12		12	0%	12	3	25
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12		12	0%	12	0	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12		12	30,35%	12	3	25
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	0%	12	3	25
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	0%	12	3	25
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12		12	0%	12	3	25
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	25,41%	12	0	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12		12	28,76%	12	3	25
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12		12	21,94%	12	3	25
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		12	59,40%	12	0	0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD			12		12		12	3	25
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1		1	0%	1	1	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	2		2	0%	2	1	50
		Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	2		2	0%	2	1	50
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan OPD			12		12	71,76%	12	3	25
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12	25,08%	12	3	25
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12	73,64%	12	3	25

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Dana Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD			12	12	12	3	25	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	12	12	0%	12	3	25
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	12	12	55%	12	3	25
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan mesin yang Terpelihara	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	0%	12	0	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	0%	2	1	50
			Indeks Risiko Bencana			118,396 (Sedang)		118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)	
Meningkatnya Pengendalian Risiko Bencana		mencatat berhalaju peningkatan pembiayaan yang bersumber dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	Persentase retribusi Pemadam Kebakaran Terhadap PAD			0,35				0,35	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah			100			100	100	100
			Kejurahan Siga Bencana			2	2	0%	2	0	0
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditegalisasi			2	2	0%	2	0	0
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		75	75	0%	75	75	75
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun			100			100	100	100
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terhadap Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditegalisasi	Dokumen	100	0	0%	100	0	0
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tergalidi Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	0	0	0%	0	0	0
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina			100			100	0	0
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Ditegalisasi	Dokumen	1	0	0%	0	0	0
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan yang terlatih	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	0	0%	75	0	0
		Penyediaan Perlatan Pertahanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Perlatan Penyelesaian Dasi bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	0	0	0%	0	0	0
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0	0	0%	0	0	0

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	0	0	0%	0	0	0
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kesiagaan dan Indeks Kapasitas.	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Ditegahasi	Dokumen	0	0	0	0%	1	0	0
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah simulasi dan Gladi Posko yang dilaksanakan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	0	0	0	0%	0	0	0
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kesiagaan dan Indeks Kapasitas.	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RP KB) yang Ditegahasi	Dokumen	2	2	2	0%	2	0	0
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana			0	0	0	0%	0	0	0
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase jumlah korban bencana yang ditangani	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang ditangani	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	100	100	100	0%	0	0	0
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang ditangani	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	0	0	0	0%	0	0	0
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah buffer stok logistik yang tersedia	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	0	0	0	0%	0	0	0
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun			0	0	0	0%	0	0	0
	Penguatan Kemampuan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kemampuan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0
	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPBD) Kota Jumlah peserta sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPBD) Kota Jumlah peserta sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana	Jumlah Laporan Hasil Binas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0

d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 s.d 2026 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025 , dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Dana yang tersedia tidak dapat memenuhi seluruh Kegiatan Kebencanaan sehingga tidak semua usulan pembangunan dari masyarakat dapat terpenuhi.
2. Defisitnya Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga menyebabkan tersendatnya pelaksanaan Program dan Kegiatan.

3. Tidak tepatnya penanganan terhadap titik titik permasalahan di lapangan sehingga hasil yang diharapkan tidak optimal.

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah *shopping list working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang membantu Walikota Bandar Lampung dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Ketertiban Umum di Kota Bandar Lampung, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung merupakan cerminan wajah Provinsi Lampung sehingga penataan Kota Bandar Lampung secara terus menerus perlu dilakukan agar bias sejajar dengan Ibukota lain di Indonesia.

Sampai saat ini Kota Bandar Lampung masih dihadapkan dengan berbagai masalah perkotaan, antara lain: kemacetan, lingkungan kumuh dan banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sampai saat ini masih dihadapkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Resiko Bencana dan Kebakaran secara lengkap dan terpadu. Tuntutan tersebut belum dapat terpenuhi secara menyeluruh karena keterbatasan dana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sebagai Institusi pelaksana teknis, pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 07 Tahun 2008 tanggal tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 40 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk analisa hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sampai dengan periode pelaksanaan Triwulan III (s.d. Akhir Bulan September) Tahun 2023 dapat dilihat di **Tabel T.C-30**.

Tabel T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kependagri 050_5889 Tahun 2021	SPM / Standar Pelayanan Minimal	IKK	Satuan Kependagri 050_5889 Tahun 2021	Target RENSTRA Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indek Resiko Bencana												
	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPBD Oleh Inspektora Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)			Dokumen				1	1				
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang / Bulan	14	14	14	14	14	14	14	14	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD				12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Paket	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Orang	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD				12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD				12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Unit	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Korban Bencana Yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Dalam 1 (satu) Tahun				100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi			Dokumen	5	5	0	1	1	5	5	5	5	

Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			Orang	100	100	0	100	100	100	100	100	100	
Persentase Daerah Rawan Bencana Yang Dibina				100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi			Dokumen	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Orang	75	75	0	75	75	75	75	75	75	
Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Kawasan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			Orang	0	0	0	100	100	0	0	0	0	
Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			Dokumen	0	1	0			1	1	1		
Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			Orang	0	0	0	100	100	0	0	0	0	
Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RP KB) yang Dilegalisasi			Dokumen	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas			Laporan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
SKP penetapan Status Darurat Bencana dan SKP DB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			Dokumen	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			Orang	0	0	0	100	100	0	0	0	0	
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Orang	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			Dokumen	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan			Dokumen	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			Laporan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan terkait Kebencanaan dan Kebakaran di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD Kota Bandar Lampung khususnya yang mempunyai keahlian kebencanaan, termasuk disini belum terbentuknya Tim Tangguh Bencana Tingkat Kelurahan dan Kecamatan sehingga pelaksanaan PRB menjadi kurang optimal.
- b. Kuantitas dan kualitas personil yang memiliki sertifikat penanggulangan kebakaran kurang memadai.
- c. Terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan PB antara lain beberapa diantaranya yang masih berstatus pinjam pakai sehingga biaya oprasional dan perawatannya serta pertanggung jawabannya menjadi kurang efektif dan optimal.
- d. Belum adanya peta rawan bencana di Kota Bandar Lampung sehingga masih sulit untuk menyusun program – program PB yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana.
- e. Kota Bandar Lampung termasuk disini adalah rencana kontijensi sebagai salah satu amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- f. Belum ada standart oprasional prosedur (SOP) baik dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana ataupun terkait dengan penanganan pengungsi di Kota Bandar Lampung.
- g. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan PB baik dalam tahap mitigasi bencana sampai dengan tanggap darurat yang berakibat pada kurangnya partisipasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dapat dilihat di tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Bandar Lampung

Nama Perangkat Daerah : BPBD KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Rancangan Awal RKPD							No	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program,Kegiatan,dan Sub Kegiatan 2025	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target	Capaian	Pagu Indikatif		Program,Kegiatan,dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target	Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.779.209.960		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.779.209.960
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	B.Lampung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang / Bulan	9.048.229.960	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	B.Lampung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang / Bulan	9.048.229.960
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	B.Lampung	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	730.980.000	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	B.Lampung	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	730.980.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						999.700.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						999.700.000
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	B.Lampung	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	Paket	979.700.000	3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	B.Lampung	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	Paket	979.700.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	B.Lampung	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	Orang	20.000.000	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	B.Lampung	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	Orang	20.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						583.432.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah						659.295.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	B.Lampung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.000.000	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	B.Lampung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	B.Lampung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	19.869.781	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	B.Lampung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	40.000.000

7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	B.Lampung	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	8.267.425	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	B.Lampung	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	20.000.000
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	B.Lampung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	420.000.000	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	B.Lampung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	420.000.000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	B.Lampung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.695.000	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	B.Lampung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.695.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	B.Lampung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.600.000	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	B.Lampung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.600.000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	B.Lampung	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	105.000.000	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	B.Lampung	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	125.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.406.306.976	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.406.306.976
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	B.Lampung	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	600.000.000	12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	B.Lampung	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	600.000.000
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	B.Lampung	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Paket	391.039.168	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	B.Lampung	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Paket	391.039.168
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	B.Lampung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Paket	415.267.808	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	B.Lampung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Paket	415.267.808

j	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.956.150.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12.983.150.000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	B.Lampung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	123.000.000	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	B.Lampung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	150.000.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12.833.150.000	16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12.833.150.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.835.368.818	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.340.207.168
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	66.089.168	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	66.089.168
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7	Unit	2.397.918.000	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7	Unit	2.397.918.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	B.Lampung	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Paket	26.200.000	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	B.Lampung	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Paket	26.200.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	B.Lampung	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	345.161.650	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	B.Lampung	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
						0								400.000.000	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							
21	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	0	21	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	400.000.000
22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	B.Lampung	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	100	Orang	0	22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	B.Lampung	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	100	Orang	0
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						800.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							950.000.000
23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	200.000.000	23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	200.000.000
24	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75	Orang	100.000.000	24	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75	Orang	100.000.000
25	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	B.Lampung	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1	Paket	100.000.000	25	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	B.Lampung	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1	Paket	100.000.000
26	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	B.Lampung	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5	Kawasan	0	26	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	B.Lampung	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5	Kawasan	0

27	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100	Orang	0	27	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100	Orang	150.000.000
28	Penyusunan Rencana Kontinjensi	B.Lampung	Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		Dokumen	300.000.000	28	Penyusunan Rencana Kontinjensi	B.Lampung	Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		Dokumen	300.000.000
29	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	B.Lampung	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	Orang	100.000.000	29	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	B.Lampung	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	Orang	100.000.000
30	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	B.Lampung	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1	Dokumen	0	30	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	B.Lampung	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1	Dokumen	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							250.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							250.000.000
31	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	B.Lampung	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1	Laporan	100.000.000	31	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	B.Lampung	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1	Laporan	100.000.000
32	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	Dokumen	150.000.000	32	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	Dokumen	150.000.000
33	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	Orang	0	33	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	Orang	0
34	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Orang	0	34	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Orang	0

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	B.Lampung					100.000.000		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	B.Lampung				100.000.000	
35	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	100.000.000	35	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	100.000.000
36	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	B.Lampung	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	Dokumen	0	36	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	B.Lampung	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	Dokumen	0
37	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	B.Lampung	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	Laporan	0	37	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	B.Lampung	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	Laporan	0

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses Usulan program dan kegiatan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dengan melakukan proses Musrembang, baik dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota.

adapun Usulan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel T-C.32.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Bandar Lampung

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Target	Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	B.Lampung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang / Bulan	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	B.Lampung	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	B.Lampung	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	402	Paket	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	B.Lampung	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	B.Lampung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	B.Lampung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	B.Lampung	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	B.Lampung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	B.Lampung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	B.Lampung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Bulan	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	B.Lampung	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	B.Lampung	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	B.Lampung	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Paket	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	B.Lampung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	B.Lampung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	B.Lampung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	B.Lampung	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Paket	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	B.Lampung	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							
21	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	
22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	B.Lampung	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100	Orang	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen	
24	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75	Orang	

25	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	B.Lampung	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1	Paket	
26	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	B.Lampung	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5	Kawasan	
27	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100	Orang	
28	Penyusunan Rencana Kontijensi	B.Lampung	Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		Dokumen	
29	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	B.Lampung	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	Orang	
30	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	B.Lampung	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1	Dokumen	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
31	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	B.Lampung	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1	Laporan	
32	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	Dokumen	

33	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	Orang	
34	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Orang	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	B.Lampung					
35	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	B.Lampung	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	
36	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	B.Lampung	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	Dokumen	
37	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	B.Lampung	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai bagian dari perencanaan nasional, RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026 juga mengacu dan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu NAWA CITA KEDUA RPJMN 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Misi dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026 telah mendukung agenda prioritas nasional tersebut kecuali pada Agenda Nomor 4 yaitu Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, karena agenda tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

1. RPJMD Kota Bandar Lampung dengan RPJMN 2023-2026

Visi RPJMN 2020-2024	Visi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong	“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya Nyaman, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kemakmuran Rakyat”

2.

Misi No	Misi RPJMN 2020-2024	Prioritas No	NAWA CITA (RPJMN 2020-2024)	Misi No	Misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026
Misi 4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.	Prioritas 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Misi 7	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

3. **RPJMD Kota Bandar Lampung dengan RPJMD Provinsi Lampung**

RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung 2023-2026. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026 dengan Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Lampung 2023-2026. Berdasarkan hasil analisa, perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:

Visi RPJMD Provinsi Lampung 2023-2026	Visi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026
“Rakyat Lampung Berjaya”	“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya Nyaman, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kemakmuran Rakyat”

Misi No	Misi Gubernur Lampung (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024)	Misi No	Misi Walikota Bandar Lampung (RPJMD Tahun 2021-2026)
Misi 6	Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.	Misi 7	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan RPJMD Kota Bandar Lampung, yaitu :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang Kebencanaan dan Kebakaran.

Sejalan dengan visi Kota Bandar Lampung tahun 2023-2026 yaitu “ Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan “ dan sesuai visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026 yaitu “ *Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.*”, maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Pemerintah kota Bandar Lampung tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut : Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sesuai dengan Misi 7 Walikota Bandar Lampung yaitu :

“Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.”.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Bandar Lampung dapat dilihat di tabel T-C.33

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiran Maju Tahun 2026
Kota Bandar Lampung**

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKONING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/P ROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM /KEGIATA N/ SUB KEGAIATA N	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKP TAHUN 2025	PERKIRAA N CAPAIAN RKP TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	27.368.227.682,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah		98,00	28.736.639.066,10	BPBD
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	9.187.269.682,00						100,00	9.646.633.166,10	BPBD
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	90		14	14	8.456.289.682,00						14	8.879.104.166,10	BPBD

1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		12	12	730.980.000,00					12	767.529.000,00	BPBD
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	999.700.000,00					100,00	1.049.685.000,00	BPBD
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	12	80	80	80	979.700.000,00	Bandar Lampung	APBD		ASN BPBD	80	1.028.685.000,00	BPBD
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80		80	80	20.000.000,00					80	21.000.000,00	BPBD
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	583.432.206,00					98,00	612.603.816,30	BPBD
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		BPBD	1	6.300.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	19.869.781,00	Bandar Lampung	APBD		BPBD	1	20.863.270,05	BPBD

1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	8.267.425,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	8.680.796,25	BPBD	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100		100	100	420.000.000,00					BPBD	100	441.000.000,00	BPBD	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Bulan	6	1	1	1	20.695.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	21.729.750,00	BPBD	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6		1	1	3.600.000,00						BPBD	1	3.780.000,00	BPBD
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		1	1	105.000.000,00						BPBD	1	110.250.000,00	BPBD
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	806.306.976,00						BPBD	98,00	846.622.324,80	BPBD
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	391.039.168,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	410.591.126,40	BPBD	

1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	415.267.808,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	436.031.198,40	BPBD
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	12.956.150.000,00						98,00	13.603.957.500,00	BPBD
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72		12	12	123.000.000,00						12	129.150.000,00	BPBD
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72		12	12	12.833.150.000,00						12	13.474.807.500,00	BPBD
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	2.835.368.818,00						98,00	2.977.137.258,90	BPBD
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	5	5	66.089.168,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Jabatan BPBD	5	69.393.626,40	BPBD

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	7	2.397.918.000,00	Bandar Lampung	APBD			Kendaraan Operasional BPBD	7	2.517.813.900,00	BPBD
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1	1	1	26.200.000,00	Bandar Lampung	APBD			Peralatan dan Mesin Lainnya BPBD	1	27.510.000,00	BPBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	345.161.650,00	Bandar Lampung	APBD			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BPBD	1	362.419.732,50	BPBD
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	1.150.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan		100,00	1.260.000.000,00	BPBD
					Keurahan Siaga Bencana		Angka	12	6	8	10							10		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	6		1	1	100.000.000,00						1	-	BPBD
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	6		1	1	-	Bandar Lampung	APBD			Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	-	BPBD

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggaldi Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	450	-		100	100.000.000,00					50	105.000.000,00	BPBD	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	700.000.000,00					100,00	735.000.000,00	BPBD	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	5	0	0	1	300.000.000,00					1	315.000.000,00	BPBD	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	2	0	0	0	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			Masyarakat Kota Bandar Lampung	75	105.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diribagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	0	0	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			BPBD	1	105.000.000,00	BPBD

1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	20	0	0	5	100.000.000,00			Masyarakat Kota Bandar Lampung	5	105.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	175	0	0	100	100.000.000,00				100	105.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan	Orang					200.000.000,00					210.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	4		1	100	100.000.000,00			Masyarakat Kota Bandar Lampung	100	105.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SKPetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	dokumen	6			1					1		BPBD
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang											BPBD

1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100		100	100	100.000.000,00			Masyarakat Kota Bandar Lampung	100	105.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun											315.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Laporan	2	1	2		100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	BPBD	1	105.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Desa / Kelurahan	2	1	2	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD	BPBD	1	105.000.000,00	BPBD
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan				1	100.000.000,00				1	105.000.000,00	BPBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat di form rumusan renja dan pendanaan *sebagai berikut* :

Tabel IV.1
**FORM RUMUSAN RENCANA KERJA DAN KEGIATAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024
 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

KODE REKENING				URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROG RAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RKP D TAHUN 2023	PERKIRAA N CAPAIAN RKP D TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	
1	05	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	27.368.227.682,00			Memperkuat Stabilitas Polhukban kam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah	
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	9.187.269.682,00					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	90		4	4	8.456.289.682,00				
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		12	12	730.980.000,00				
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	999.700.000,00					
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	12	80	80	80	979.700.000,00	Bandar Lampung	APBD		
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80		80	80	20.000.000,00				
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	583.432.206,00					
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedekkan	Paket	6	1	1	1	6.000.000,00	Bandar Lampung	APBD		

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	9.869.781,00	Bandar Lampung	APBD		
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	8.267.425,00	Bandar Lampung	APBD		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100		100	100	420.000.000,00				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	6	1	1	1	20.695.000,00	Bandar Lampung	APBD		
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6		1	1	3.600.000,00				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		1	1	105.000.000,00				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	806.306.976,00				
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	39.1039.168,00	Bandar Lampung	APBD		
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	415.267.808,00	Bandar Lampung	APBD		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	12.956.150.000,00				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72		12	12	123.000.000,00				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72		12	12	12.833.150.000,00				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	98,00	98,00	98,00	2.835.368.818,00				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	5	5	66.089.168,00	Bandar Lampung	APBD		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	7	7	7	7	2.397.918.000,00	Bandar Lampung	APBD		

1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	1	1	1	26.200.000,00	Bandar Lampung	APBD				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	345.161.650,00	Bandar Lampung	APBD				
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	1.300.000.000,00				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan	Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	
						Kelurahan Siaga Bencana	Angka	12	6	8	10							
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditegalisasi	Dokumen	6		1	1	100.000.000,00						
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditegalisasi	Dokumen	6		1	1		Bandar Lampung	APBD				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	450			100	100.000.000,00						
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibangun	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	700.000.000,00						
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Ditegalisasi	Dokumen	5	0	0	1	300.000.000,00						
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	2	0	0	0	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	0	0	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD				
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	20	0	0	5	100.000.000,00						

1	05	03	2.03	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	75	0	0	100	100.000.000,00					
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan	Orang					200.000.000,00					
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	4		1	100	100.000.000,00					
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	dokumen	6			1						
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang										
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100		100	100	100.000.000,00					
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dok Rencana Penanggulangan Bencana dan Jumlah Raperda Penanggulangan Bencana yang tersusun						300.000.000					
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelengkapan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelengkapan Bencana Daerah	Laporan	2	1	2		100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Desa / Kelurahan	2	1	2	1	100.000.000,00	Bandar Lampung	APBD			
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan				1	100.000.000,00					

